

Menimbang Positivisme

O. Hasbiansyah

Harus diakui, pengaruh positivisme dalam ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu komunikasi, masih sangat kuat dan luas. Hal ini, misalnya, bisa dilihat dalam rumusan-rumusan metodologi penelitian. Masalah generalisasi, objektivitas, deskripsi sebab-akibat, yang sederhana, kerap ditemukan.

Tak bisa dipungkiri, memang, bahwa positivisme berjasa dalam mengembangkan metodologi ilmiah, di samping dosa-dosanya yang juga cukup besar. Karena itu, pemahaman asumsi-asumsi positivisme, dan kritik-kritik terhadapnya, cukup penting bagi para ilmuwan.

Sebab, hal ini, secara filosofis, sangat pendasar.

Penting disadari, positivisme telah memberikan landasan sistematis, dan membantu cara berpikir dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Positivisme telah memberikan bimbingan, melalui verifikasi dalam proses penelitian, misalnya. Tetapi juga, dengan memahami kritik-kritik tadi, penting juga disadari bahwa penalaran ilmu pengetahuan positivisme, telah memperkerdil realitas. Padahal realitas itu sangat kaya dan penuh nuansa. Realitas direduksi ke dalam gambaran yang kering dan miskin, sehingga realitas sesungguhnya (yang diungkap) bisa keliru, dan menyesatkan.

Dengan demikian, betapapun serangan bertubi-tubi dilancarkan pada positivisme, masih ada sejumlah manfaat yang bisa dipetik. Kritik-kritik tajam itu, mungkin, tak bisa menghapus seluruh penalaran yang didasarkan pemahaman positivisme.

Kritik-kritik demikian harus dipandang sebagai proses dialektis, untuk menemukan pendekatan yang dianggap lebih baik.

1. Pendahuluan

Positivisme sebagai pendekatan, cara pandang, perspektif, paradigma, ataupun filsafat ilmu, telah memberikan banyak warna khas dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial. Walaupun sudah lama mendapat kritikan tajam, serangan gencar, kecaman garang, dan kemudian bermunculan pendekatan-pendekatan baru, hingga saat ini positivisme masih laku dikunyah dan ditelan para ilmuwan. Clifford Geertz (1973) pernah menyatakan bahwa masa keemasan positivisme, sebagai sebuah dogma metodologis, telah usai dalam ilmu-ilmu sosial dan telah digantikan perspektif-perspektif baru (Mulyana, 1999:19). Namun, kenyataan menunjukkan bahwa, khususnya di Indonesia, perspektif ini masih cukup dominan. Bahkan, hasil pengamatan Hidayat (1999:35-36), dominasi positivisme di Universitas Indonesia—salah satu perguruan tinggi terkemuka di tanah air—masih tampak menonjol, dan terasa kental, meskipun

sudah mulai bermunculan paradigma lain yang lebih variatif.

Sampai pada takaran tertentu, positivisme telah cukup berjasa dalam memberikan arahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Disadari atau tidak, banyak metode penelitian yang ditulis dan diajarkan di berbagai perguruan tinggi, sesungguhnya dibangun dengan menggunakan positivisme sebagai landasannya. Penalaran induktif, misalnya, yang merupakan salah satu “pedoman metode ilmiah”, basisnya bisa ditelusuri hingga ke positivisme, yakni ketika menggeneralisasikan pecahan realitas. Dalam metode ilmiah, penyimpulan dilakukan berdasarkan pada fakta-fakta spesifik yang diperoleh lewat observasi.

Di samping memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial, positivisme juga dipandang telah menebarkan kesesatan dalam

memandang realitas. Positivisme dinilai terlalu simplistik dalam mengakui kebenaran. Implikasinya bisa sangat jauh. Etika, nilai, norma —karena tidak bisa diukur— menjadi hal yang dicampakkan.

Makalah ini tidak bermaksud mengembangkan kembali tradisi positivistik, tidak juga untuk mengkritik dan menafikkannya sama sekali dalam wacana keilmuan. Dalam makalah ini, coba diuraikan sekilas asal-usul positivisme beserta pelbagai pengertian mendasarnya. Selanjutnya, tulisan ini menjelaskan pula karakteristik positivisme dalam metodologi ilmu pengetahuan. Lebih jauh lagi, dijelaskan pula asumsi-asumsi dasarnya, dan menunjukkan berbagai kelemahan yang ada di dalamnya, sehingga pada akhirnya didapat perspektif yang komprehensif.

2. Karakteristik Positivisme

2.1. Asal-usul dan Beberapa Pengertian

August Comte (1798-1857) adalah salah seorang perintis positivisme. Melalui positivismelah, menurut Comte, ilmu pengetahuan dikembangkan secara ilmiah.

Comte berpendapat, dalam sejarahnya ilmu pengetahuan terbagi dalam tiga tahap perkembangan intelektual manusia, yang masing-masing merupakan perkembangan dari tahap sebelumnya (Soekanto, 1993:34-35; Ritzer, 1996:14-16). Tahap pertama, tahap teologis (theological), yakni sebelum tahun 1300 M. Pada tahap ini, manusia menafsirkan gejala-gejala di sekelilingnya secara teologis, dengan kekuatan roh dewa-dewa atau Tuhan. Segala fenomena yang ada dalam alam dan kehidupan, selalu dikaitkan dengan kekuatan-kekuatan supranatural, hasil tindakan langsung dari roh dewa atau Tuhan. Pengetahuan dipandang sebagai hal yang absolut.

Tahap kedua adalah tahap metafisis (metaphysical), periode tahun 1300-1800. Tahap ini, menurut Comte, merupakan bentuk lain dari tahap pertama. Pada tahap ini, manusia menganggap di dalam setiap gejala terdapat kekuatan-kekuatan abstrak, yang dapat diungkapkan. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk mencari sebab-akibat gejala itu. Suatu kejadian dipandang sebagai manifestasi dari suatu hukum alam yang tidak berubah.

Tahap terakhir adalah tahap positif (positivistic), dimulai 1800. Pada saat ini, manusia telah mampu berpikir, mencari hukum-hukum kausal alam semesta dan kehidupan manusia. Apa yang diketahui manusia, semuanya berasal dari pengalaman inderawi atau data empiris. Inilah yang disebut positivisme. Pada tahap ini, ilmu pengetahuan berkembang.

Penjelasan konkret dari ketiga tahap di atas, diilustrasikan oleh Johnson (1986:86):

“ . . . bayangkanlah, bahwa kita mau menjelaskan perilaku seseorang yang bengis atau antisosial. Dalam tahap teologis, tahap ini mungkin dapat dijelaskan dalam hubungannya dengan suatu roh jahat yang dimilikinya atau merupakan hasil dari suatu dosa asal; dalam tahap metafisis, hal ini akan dijelaskan mungkin sebagai hasil dari suatu pelanggaran hukum alam; dalam tahap positif, hal itu dijelaskan dalam hubungannya dengan pengaruh yang ditentukan oleh lingkungan dalam mengukuhkan atau menghilangkan pelbagai pola-pola perilaku”.

Positivisme menolak pemikiran yang didasarkan kepada tahap pertama dan kedua. Keduanya bukan dianggap ilmu pengetahuan. Positivisme menganggap ilmu pengetahuan hanya berurusan dengan fakta-fakta yang riil, dan dapat diindrai. Karena itu, metafisika harus ditolak. Metafisika dianggap tidak riil, dan tidak dapat diindrai. Dalam kerangka ini, wahyu dan kepercayaan-kepercayaan agama, hanyalah takhayul belaka.

Ilmu pengetahuan mencakup suatu pendekatan sistematis, dalam mengumpulkan data empiris, untuk tujuan menemukan hukum-hukum alam. Positivisme beranggapan, suatu hukum alam hanya merupakan pernyataan keteraturan hubungan yang terdapat di antara gejala-gejala empiris. Kaum positivis percaya bahwa manusia merupakan bagian dari alam, metode-metode penelitian empiris dipergunakan untuk menemukan hukum-hukum kehidupan manusia. Dengan demikian, penjelasan-penjelasan teologis dan metafisis tidak punya hubungan sama sekali dengan masalah ilmu

pengetahuan; semua itu nonsense. Sehubungan dengan itu, positivisme diartikan sebagai kebalikan dari yang abstrak: real; kebalikan dari yang tidak bermanfaat: berguna; kebalikan dari yang meragukan: pasti; dan kebalikan dari yang negatif: positif. Positivisme Comte—disebut pula filsafat positif (*positive philosophy*), sebagai reaksi terhadap, apa yang disebut Comte, filsafat negatif dan destruktif pada masa Pencerahan dan Revolusi Perancis. Pada saat itu, ia merasa terganggu oleh sikap-sikap anarkis di masyarakat dan para pemikir Perancis. Comte tidak menyukai revolusi. Ia lebih senang menjalani perubahan lewat evolusi. Positivisme, menurut Comte, membawa keteraturan kehidupan sosial, bukan kekacauan revolusi.

Dalam kerangka positivismenya, Comte mengembangkan apa yang disebutnya, “fisika sosial” (*social physics*), yang pada tahun 1822 disebutnya sebagai sosiologi (Ritzer, 1996:13). Istilah “fisika sosial” menunjukkan bahwa Comte tampaknya begitu terkesan oleh kesuksesan “ilmu-ilmu keras” (*hard sciences*), atau ilmu-ilmu alam, seperti fisika, saat itu. Kegemilangan ilmu-ilmu alam, kemudian, menyeret Comte dan para ilmuwan sosial, mengadopsi pendekatan-pendekatan ilmu tersebut dalam mempelajari kehidupan sosial manusia. Pada akhir 1920 dan awal 1930, para sosiolog, secara intens, menggunakan metode penelitian ilmu-ilmu alam (Jensen dan Jankowski, 1993:49). Dalam hal ini, Durkheim, secara provokatif, menyatakan bahwa bagi seorang positivis, ilmuwan sosial harus mempelajari fenomena sosial “in the same state of mind as the physicist, chemist, or physiologist when he probes into a still unexplored region of the scientific domain (May, 1997:10). Dengan kata lain, terjadi elaborasi penggunaan metode ilmu-ilmu alam ke dalam ilmu-ilmu sosial, dalam spektrum sangat luas. Menurut Giddens (1975), sikap positivistik demikian meliputi tiga pengandaian, yang saling berkaitan (Hardiman, 1993:24). Pertama, bahwa pelbagai prosedur metodologis ilmu-ilmu alam dapat diterapkan pada ilmu-ilmu sosial. Subjektivitas manusia, kepentingan-kepentingan manusia, dipandang tidak mengganggu objek pengamatan, yaitu tingkah laku manusia. Kedua,

hasil-hasil penelitian itu dapat dirumuskan dalam ‘hukum-hukum’ seperti dalam ilmu-ilmu alam. Ketiga, ilmu-ilmu sosial harus bersifat teknis, menyediakan pengetahuan yang bersifat instrumental murni. Jadi, pengetahuan harus dapat dipakai untuk apa saja.

Salah seorang tokoh ilmu sosial Amerika Serikat berbasiskan paradigma positivisme — sekaligus juga dipengaruhi Marxisme, adalah C. Wright Mills. Di tangan Mills, positivisme mampu menembus seluruh sejarah penelitian ilmu sosial di Amerika Serikat; dan dengan cepat digemari di Eropa Barat, sejak Perang Dunia II (James, 1999:58). Positivisme menawarkan pemahaman mengenai realitas secara linear, sederhana, logis, dan mudah dicerna, sehingga menarik minat orang. Di samping untuk menjelaskan realitas, fungsi penelitian positivistik juga meramalkan masa depan realitas tersebut.

Dari sisi lain, lahirnya positivisme bisa dilacak dari pandangan dualisme “kita” —manusia, pengamat— yang dianggap sebagai pusat, dan “dunia luar” sebagai objek yang diketahui (Subangun, 1994:16). Dunia luar sebagai obyek mampu diketahui dan ditangkap secara tepat, sehingga dapat menurunkan hukum-hukum alam yang menunjukkan keteraturan proses. Maksud “dunia luar” positivisme, tentu saja, merupakan hal-hal empiris, dapat dicerap oleh alat indera.

Lebih lanjut, secara semantis, positivisme (*positivism*) berasal dari kata positif (*positive*). Oleh Comte, istilah positif diartikan sebagai “apa yang berdasarkan fakta”. Positivisme selalu menekankan bahwa pengetahuan itu tidak boleh melebihi fakta. Arti “positif” itu sendiri, dijelaskan Comte sebagai berikut:

(1) Positif dalam arti ‘yang nyata’: semua pengetahuan harus terbukti lewat rasa kepastian pengamatan sistematis yang menjamin intersubjektivitas.

(2) Positif dalam arti ‘yang pasti’: kepastian metodis sama pentingnya dengan rasa kepastian ... kesahihan pengetahuan ilmiah dijamin oleh kesatuan metode.

(3) Positif dalam arti ‘yang tepat’: ketepatan pengetahuan kita dijamin hanya oleh bangunan

teori-teori yang secara formal kokoh, yang mengikuti deduksi hipotesis-hipotesis yang menyerupai hukum.

(4) Positif dalam arti 'yang berguna': pengetahuan ilmiah harus dapat digunakan secara teknis ... Ilmu pengetahuan memungkinkan kontrol teknis atas proses-proses alam maupun sosial ... kekuatan kontrol atas alam dan masyarakat dapat dilipatgandakan hanya dengan mengikuti asas-asas rasionalis — tidak melalui perluasan buta dari riset empiris, melainkan melalui perkembangan dan penyatuan teori- teori.

(5) Positif dalam arti 'yang mengklaim memiliki kesahihan relatif': pengetahuan kita pada prinsipnya tak pernah selesai dan relatif, sesuai dengan 'sifat relatif dari semangat positif' (Hardiman, 1993:128).

Positivisme menganggap pengetahuan fakta objektif-empiris sebagai pengetahuan yang sah. Dari sini, lahir semangat mengukur yang teramati, mengkuantifikasikannya, dan merumuskan generalisasi, dan hasil pengamatan. Dalam hal ini, positivisme ditegakkan pada logiko-empirisme, yaitu bahwa sesuatu dipandang ada bila dapat diukur, dapat dihitung dengan bilangan (Rakhmat, 1990b:213). Metode ilmiah, yang mengandalkan data inderawi diklaim sebagai hal mutlak dalam ilmu pengetahuan. Namun, ilmu pengetahuan itu sendiri bersifat relatif; semangat positivisme memperlihatkan keterbukaan yang terus-menerus terhadap data baru, atas dasar mana pengetahuan dapat ditinjau kembali dan diperluas. Munculnya klaim positivisme, ilmu pengetahuan merupakan satu- satunya pengetahuan sejati, merupakan implikasi dari —dan sekaligus diperkuat oleh— keberhasilan metode ilmu-ilmu alam dalam menjelaskan fakta-fakta empiris sebagaimana disinggung di muka.

Akhirnya, positivisme menunjukkan watak 'ideologis' karena mengklaim metodologi ilmiah sebagai satu-satunya pengetahuan yang mungkin tentang "kenyataan dan kebenaran". Dengan klaim ini, positivisme menutup kemungkinan koreksi terhadap dirinya. Positivisme terperosok ke dalam absolutisme, tidak menerima kemungkinan lain sebagai kebenaran selain ilmu pengetahuan.

'Arogansi' positivisme ini dikecam Horkheimer. Horkheimer menyebutnya sebagai "dogma tentang ilmu pengetahuan yang percaya pada dirinya sendiri" (Hardiman, 1993:127).

2.2 Prinsip Verifikasi

Prinsip verifikasi, yang dimunculkan Alfred Jules Ayer, adalah untuk menentukan bermakna tidaknya suatu ucapan (Bertens, 1981:34). Pernyataan "Jakarta terletak di Sumatera", misalnya, adalah kalimat bermakna karena bisa diverifikasi. Tetapi tidak benar, karena hasil verifikasi menyatakan bahwa Jakarta terletak di Jawa. Ucapan "Berakhlak baik itu akan membawa pada kehidupan mulia", bagi Ayer, bukanlah pernyataan yang bermakna karena tidak bisa diverifikasi. Oleh sebab itu, menurut Ayer, supaya sebuah pernyataan itu bermakna, pernyataan itu harus menunjuk pada sesuatu yang empiris, menyangkut data inderawi. Jadi, ucapan yang bermakna itu harus berupa observation-statement.

Ucapan atau pernyataan yang berkaitan dengan data empiris itu, seperti dicontohkan di atas, disebut kalimat protokol atau kalimat basis (Magnis-Suseno, 1992:197). Kalimat itu dikatakan kalimat basis/ dasar, karena, bagi positivisme, kalimat demikian merupakan batu bangunan dasar bagi suatu teori ilmiah.

Prinsip verifikasi, bagi Ayer, tidak harus selalu dilakukan secara faktual, dan menunjuk pada realitas indrawi secara langsung. Dalam masalah sejarah, misalnya, cukuplah verifikasi dilakukan melalui kesaksian orang lain yang dapat dipercaya.

Namun demikian, Ayer mengakui adanya ucapan yang tidak menunjuk pada data empiris, tetapi tetap memiliki makna, yaitu ucapan-ucapan matematika dan logika. Pernyataan: "4 ditambah 2 sama dengan 6" tidak menunjuk pada realitas inderawi sehingga tidak bisa diverifikasi. Untuk menentukan benar tidaknya, adalah dengan cara mengamati bahasa dan logikanya.

Jika dicermati lebih dalam, prinsip verifikasi ini mempunyai konsekuensi yang tidak kecil. Berdasarkan prinsip ini, pernyataan-pernyataan tentang norma, etika, atau nilai harus ditolak.

“Tuhan itu Mahakasih”, “Kita harus berbuat baik”, “Jangan mencontek” bukanlah ucapan-ucapan bermakna, karena tidak bisa diverifikasi. Kata Ayer, mungkin ucapan-ucapan itu, secara emosional, mempunyai arti bagi orang tertentu, tetapi sama sekali tidak memberikan pengenalan tentang realitas (Bertens, 1981:36). Segala hal yang tak bisa diindrai, tidak bisa diverifikasi, berarti tidak bermakna, dan berarti pula, harus dicampakkan; karena bukan realitas sejati yang memiliki kebenaran.

2.3 Positivisme Utilitarian dan Anti-Intelektual

Talcott Parson, sosiolog, membagi positivisme ke dalam dua kategori: positivisme utilitarian dan positivisme anti-intelektual (Johnson, 1990:107). Persamaan keduanya adalah bahwa metode ilmiah menjadi titik tekan upaya menjelaskan perilaku manusia yang deterministik. Dengan asumsi deterministik ini, terkandung implikasi perilaku hanya suatu fungsi saja dari situasi. Sedangkan, orientasi normatif, yang mengatur atau mengendalikan pilihan alat dan tujuan, diabaikan.

Positivisme utilitarian dikembangkan pemikiran sosial Inggris, terutama dalam teori ekonomi. Teori ekonomi dan pemikiran sosial di Inggris cenderung bersifat individualistik, dan mengasumsikan model perilaku manusia rasional, di mana manusia dilihat sebagai penganalisis dan penilai lingkungannya menurut skema alat-tujuan yang bersifat rasional. Tindakan manusia diperhitungkan untuk memaksimalkan kesenangan, atau keuntungan, dan meminimalkan penderitaan, atau kerugian. Dalam positivisme jenis ini, faktor subjektivitas manusia masih diperhitungkan. Walaupun tekanan lingkungan kuat, manusia dipandang memiliki kemampuan untuk memilih.

Dalam positivisme anti-intelektual, perilaku manusia semata dianggap tunduk pada determinisme lingkungan. Proses-proses subyektif sama sekali diabaikan. Perilaku dijelaskan hanya dalam kaitannya dengan lingkungan, termasuk lingkungan materiil dan aspek genetis.

Parson bukanlah seorang positivis. Ia sendiri mengecam kedua cabang pandangan positivisme

tadi, karena keduanya sama-sama mengabaikan aspek nilai dan norma. Baginya, rantai alat dan tujuan itu sangat kompleks, tidak sesederhana yang digambarkan positivisme utilitarian. Di samping itu, dalam kenyataan, sebenarnya, proses-proses subjektif sangat penting, tak bisa disingkirkan seperti dilakukan positivisme anti-intelektual. Ketika Parson membahas positivisme, sebetulnya, ia mencari titik temu antara falsafah ini dengan idealisme. Tetapi, di sini, bukan tempatnya untuk menguraikan sintesis kedua falsafah ini.

Determinisme positivisme uraian Parson terkait dengan pandangan Emile Durkheim, seorang sosiolog yang juga positivis; yang menyatakan bahwa terdapat tiga karakteristik gejala fakta sosial (Johnson, 1986:178). Pertama, gejala sosial itu bersifat eksternal terhadap individu. Setiap individu berkonfrontasi dengan fakta sosial, yang berada sebagai kenyataan eksternal. Kedua, fakta sosial itu juga memaksa individu. Menurut Durkheim, individu dipaksa, dibimbing, diyakinkan, didorong, atau dengan cara tertentu dipengaruhi, berbagai tipe fakta sosial lingkungan. Ketiga, fakta-fakta sosial tadi bersifat umum, yaitu, tersebar meluas dalam masyarakat. Fakta sosial itu bersifat kolektif, milik bersama, bukan hasil persepsi individual. Dari uraian ini, tampak Durkheim termasuk positivis yang sangat deterministik.

3. Asumsi dan Kritik terhadap Positivisme

3.1 Beberapa Asumsi Positivisme

Asumsi-asumsi positivisme diformulasikan dengan rumusan yang sangat beragam. Rakhmat (1990:5; 1999:66-68) mengidentifikasi lima asumsi dasar positivisme: (1) realisme naif, (2) dualisme peneliti-obyek, (3) generalisasi, (4) kausalitas linear, dan (5) bebas nilai. Kelima asumsi positivisme ini, sebetulnya, bisa dilacak dalam uraian sebelumnya. Perlu dipahami, kelima asumsi itu bukan hal yang terpisah-pisah, tetapi memiliki keterkaitan satu sama lain.

Realisme naif. Istilah lainnya adalah objektivisme. Realisme naif mengemukakan bahwa

positivisme dibangun di atas pandangan asumsi ontologis, mengenai realitas tunggal dan objektif. "Di sana" ada realitas yang dapat diamati dan diketahui. Semua realitas—fisikal, temporal, dan sosial—dapat diketahui dengan menghimpun hasil penelitian individual, yang berupa perkiraan. Realitas dapat dipecah menjadi bagian-bagian kecil, yang dapat diteliti secara terpisah. Keseluruhan adalah jumlah bagian-bagian itu (Rakhmat, 1990:4).

Fakta itu berada "di sana", merupakan barang "asing", yang akan dikenali oleh si pengamat. Jika fakta itu berupa masyarakat, misalnya, maka masyarakat dipandang sebagai barang objektif yang tak dikenali asal-usulnya (Hardiman, 1993:130). Dengan kata lain, realisme naif mempertahankan kualitas-kualitas yang dirasakan itu secara formal, lepas dari sensasi dan cara subjek menerimanya (Hadi, 1994:57). Setiap orang dianggap memiliki pemahaman yang sama tentang suatu fakta dan realitas. Lagi-lagi hal ini didasarkan pada pendekatan ilmu-ilmu alam, seperti tercermin dari pendapat May (1997:10), "*Objectivity is defined by positivism as being the same as that natural science and social life may be explained in the same way as natural phenomena.*"

Berdasarkan asumsi ini, Mach menegaskan bahwa pengetahuan yang sah adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara menyalin fakta (Hardiman, 1993:129); karena fakta itu jelas tampak "di sana", dapat diraba, dan dicerap alat inderawi. Selain itu, dari kerangka asumsi ini dipahami pula bahwa realitas itu dapat dikontrol, dikendalikan, sebagaimana dikehendaki peneliti tanpa mengurangi tingkat objektivitasnya. Dengan demikian, ilmu itu dipandang sangat objektif. Ilmu pengetahuan itu memiliki objektivitas yang tak bisa diganggu gugat.

Lebih jauh, implikasinya, klaim objektivitas ini pengetahuan menjadi terpisahkan dari praksis kehidupan manusia, tidak terikat dengan etika; karena ilmu pengetahuan menjadi barang yang obyektif dan netral. Hal ini melahirkan asumsi positivisme yang lain: bebas nilai.

Dualisme peneliti-objek. Peneliti, dan yang diteliti, bagi positivisme, merupakan dua hal yang terpisah secara tegas. Interaksi keduanya dapat

dieliminasi, bahkan disingkirkan melalui metode tertentu.

Metode ilmiah dipandang mampu menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan pengaruh peneliti terhadap yang diteliti. Pemisahan, antara peneliti dan objek yang diteliti ini, tidak hanya berlaku dalam ilmu-ilmu alam, tetapi juga dalam ilmu-ilmu sosial. Dalam hal ini, Giddens menyatakan bahwa prosedur-prosedur metodologis ilmu-ilmu alam dapat langsung diterapkan pada ilmu-ilmu sosial. Subjektivitas manusia, kepentingan-kepentingan manusia, dipandang tidak akan mengganggu objek pengamatan, yaitu tingkah laku manusia (Hardiman 1993:24).

Generalisasi. Positivisme mengasumsikan keterlepasan observasi dari faktor waktu dan konteks; apa yang benar, pada satu waktu dan tempat, juga benar pada waktu dan tempat yang lain. Hasil pengamatan sampel dapat dijadikan estimasi untuk seluruh populasi.

Asumsi generalisasi ini juga merupakan salah satu implikasi dari asumsi objektivisme. Karena realitas dipandang objektif dan tunggal, setiap pecahan realitas itu bisa digeneralisasikan. Hukum-hukum yang mengatur pola perilaku individu dalam kelompok kecil pada suatu peristiwa, misalnya, dianggap berlaku juga dalam kelompok besar pada peristiwa yang bersangkutan.

Generalisasi ini dapat tercermin dalam penalaran induktif. Penalaran induktif adalah penyimpulan dari serangkaian keterangan tunggal, hasil observasi, ke pembenaran keterangan umum atau universal. Teori-teori ilmiah, dan ilmu pengetahuan, diperoleh melalui penyimpulan dari sejumlah fakta pengalaman, yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen. Kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, untuk mengadakan generalisasi secara sah dengan penalaran induktif, adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah keterangan observasi yang membentuk dasar suatu generalisasi harus besar.
- b. Observasi harus diulang-ulang pada variasi kondisi yang luas.
- c. Keterangan-observasi yang sudah diterima, tidak boleh bertentangan dengan hukum

universal yang menjadi kesimpulannya. (Chalmers, 1982:4)

Kausalitas linear. Hubungan sebab akibat (kausalitas) merupakan prinsip alam, yang ingin ditemukan positivisme dalam ilmu. Bila orang mengetahui X sebagai penyebab Y, tulis Rakhmat (1990), ia bukan saja dapat meramalkan Y dengan pengetahuannya tentang X, ia juga dapat mengendalikan Y. Karena kausalitas menjadi pusat perhatian, alam menjadi deterministik.

Kausalitas linear didasarkan pada kaidah *orde* dan *determinisme* alam (lihat: Rakhmat, 1989:5). Orde berarti alam ini teratur, berjalan tidak serampangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi, di dunia ini, mengikuti urutan teratur dalam pola dan tatanan (*orde*) tertentu. Karena keteraturan dalam suatu tatanan itu, peristiwa-peristiwa kehidupan itu bisa diramal, dan bahkan dikendalikan. Determinisme menunjukkan, setiap peristiwa itu memiliki sebab, determinan, atau anteseden (pendahulu), yang pasti dan dapat diselidiki. Peristiwa dipandang bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi berada dalam ikatan sebab-akibat yang sudah tertentu.

Bebas nilai. Postulat kebebasan nilai dalam ilmu pengetahuan ini, menurut Magnis-Suseno (1992:195), mengimplikasikan dualisme antara pengetahuan yang rasional, objektif, dan bebas nilai; yang dapat menjadi objek ilmu pengetahuan di satu pihak, dan keputusan-keputusan yang berdasarkan nilai dan norma-norma, yang dianggap tidak terbuka bagi argumentasi rasional, subjektif, dan tidak dapat menjadi objek ilmu pengetahuan di lain pihak. Keduanya merupakan hal yang terpisah. Bagian yang pertama merupakan fakta, yang dapat dikontrol secara ilmiah, melalui pengamatan empiris. Fakta tidak tergantung pada keputusan, keyakinan, atau nilai tertentu. Dari fakta seperti ini, diperoleh pengetahuan yang tertata sistematis, yaitu ilmu pengetahuan. Sedangkan bagian kedua, merupakan keputusan bagaimana orang bertindak, didasarkan keyakinan tertentu. Keyakinan, norma, nilai, dan sejenisnya, menurut positivisme, tidak berasal dari fakta karena itu bukan merupakan pernyataan tentang fakta. Keyakinan berasal dari masing-masing individu sehingga

sangat subjektif. Karena sifatnya subjektif, maka nilai tidak bisa dikontrol, dan tidak bisa diterapkan untuk semua orang, dalam berbagai hal. Oleh sebab itu, kata kaum positivis, ilmu pengetahuan harus membebaskan diri dari keputusan-keputusan yang menilai. Pendek kata, ilmu pengetahuan harus bebas nilai. Ilmu pengetahuan adalah demi ilmu pengetahuan itu sendiri. Menurut Comte, positivisme merupakan puncak pembersihan pengetahuan dari kepentingan, dan awal pencapaian cita-cita untuk memperoleh pengetahuan demi pengetahuan, yaitu, teori yang dipisahkan dari praxis hidup manusia (Hardiman, 1993:23).

Dualisme di atas sebetulnya merupakan pengejawantahan pandangan Immanuel Kant, yang membagi realitas ke dalam dua bagian: dunia fenomena dan dunia noumena.

Dalam hal ini Charon (1979:11) menjelaskan:

The world of phenomena is the world we can experience with our senses and is open to scientific and rational investigation. Science observes the world of phenomena —the natural world— and reason orders these observations. The world of noumena is above scientific investigation and cannot be approached by empirical observation since it is not physical/empirical. Although many people have attempted to approach this, they have failed.

Pandangan ini memberi jalan lahirnya positivisme, hanya mengambil dunia fenomena, dan menyingkirkan pertimbangan dunia noumena, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dari sinilah, tolak pangkal asumsi bebas nilai positivisme muncul.

3.2 Kritik terhadap Positivisme

Positivisme sudah diserang dari berbagai arah. Banyak kalangan ilmuwan begitu semangat “mengeroyok” falsafah ini. Salah seorang penyerang positivisme, yang sangat gigih, adalah Habermas. Tokoh lain, yang juga pengkritik falsafah ini, adalah, antara lain, Chalmers dan Parson.

Kritik berikut dirumuskan dalam rumusan asumsi yang bertolak belakang dengan asumsi-

asumsi positivisme, sebagaimana diuraikan dari pokok pikiran Rakhmat (1990).

Realitas hasil konstruksi (*constructed reality*). Fenomenologi menyatakan bahwa setiap orang memiliki pengalaman yang unik tentang realitas. Realitas menampakkan dirinya secara beragam, dalam tangkapan setiap orang. Oleh karena itu, tidak ada realitas tunggal, yang dapat disepakati bersama. Setiap pengamat membentuk realitasnya sendiri. Ketika peneliti menyusun angket, misalnya kata Rakhmat (1990:5), ia sedang membuat peta realitas menurut pemikirannya.

Contoh berikut, juga menunjukkan, realitas itu merupakan hasil konstruksi. YIS, sebuah organisasi perencana komunikasi di Jawa Tengah, bermaksud untuk menyadarkan masyarakat Indonesia bagian timur. Di daerah sasaran, sering terjadi bencana alam. YIS ingin mengajarkan penduduk teknik- teknik menghadapi bencana alam. Penduduk akan dilatih menjadi Kesatuan Penyelamat. Latihan diselenggarakan dengan menggunakan gambar, mengingat tingkat pendidikan sasaran umumnya masih rendah. Sebelumnya, gambar-gambar itu dipraujikan pada wakil-wakil kelompok sasaran. Mengejutkan, mereka memperhatikan apa yang tidak diperhatikan oleh para perencana gambar. Orang desa sasaran, ternyata, tidak memahami perspektif. Salah seorang sasaran mempertanyakan, apakah orang yang berbadan besar (di bagian depan gambar) bisa masuk rumah yang kecil (gambar rumah sebagai latar belakang). Ketika gambar karikatur diperlihatkan, reaksi mereka menggelikan. Seorang pemimpin tradisional, yang sedang menjadi obyek prauji itu, menyatakan bahwa yang ada dalam gambar itu adalah setan (Rakhmat, 1990b:208).

Contoh di atas menunjukkan, bahwa setiap orang memiliki kecenderungan untuk mengkonstruksi realitas. Mana sebetulnya realitas yang obyektif, apakah realitas menurut si perancang gambar, atau realitas menurut sasaran tadi, tidak bisa dengan begitu saja dipastikan. Terjadinya perbedaan realitas hasil konstruksi ini dipengaruhi, antara lain, latar belakang budaya dan tata nilai individu.

Ilmu, yang jatuh pada objektivisme yang

menganggap realitas itu obyektif dan tunggal, sebenarnya, telah mengarahkan ilmu sebagai ideologi yang menutup kenyataan sesungguhnya. Realitas, jadinya, dipandang tanpa nuansa. Setiap orang harus memahami realitas secara persis, sama, satu dengan lainnya. Karena obyektif, setiap gambaran, yang ada di kepala si pengamat, dipandang tiruan realitas. Hal ini ditolak Habermas. Menurutnya, pandangan demikian tak lain dari ilusi objektivisme, karena positivisme menipu ilmu pengetahuan, dengan gambaran dunia otonom, yang terdiri atas susunan fakta yang dapat diamati alat indera.

Lebih lanjut, Habermas mengatakan (Hardiman, 1993:130):

“Objektivisme, yang menciptakan dogma tentang tafsiran prailmiah atas pengetahuan sebagai salinan dari kenyataan, membatasi jalan masuk ke dalam kenyataan dengan dimensi yang ditetapkan oleh sistem acuan ilmiah lewat obyektivikasi metodis dari kenyataan.”

Menurut Habermas, mengatasi pandangan positivisme demikian, harus dilakukan upaya refleksi terhadap metodologi ilmu pengetahuan itu sendiri.

Pengamat partisipan. Dalam kenyataan, sulit dipertahankan asumsi bahwa interaksi, antara peneliti dan yang diteliti dapat disingkirkan.

Salah satu kasus, yang menunjukkan terdapat interaksi antara peneliti dan yang diteliti, adalah penelitian di Hawthorne, yang kemudian menghasilkan yang disebut *efek Hawthorne*. Penelitian ini diselenggarakan di Western Electric Company (Sears, et al., 1991:84; Thoha, 1983:22). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kondisi fisik tempat bekerja dengan produktivitas karyawan.

Penelitian ini dilakukan beberapa fase. Salah satu fasenya, adalah penelitian tentang pengaruh cahaya. Beberapa kelompok pekerja diberi penerangan yang berbeda-beda, di tempat mereka bekerja. Pada setiap kelompok penerangannya diatur, dari yang paling terang hingga paling redup. Kemudian, mereka diamati, dicatat, perkembangannya. Ternyata hasilnya berbeda-beda, ada yang produktivitasnya meningkat, ada

yang tetap, ada pula yang menurun. Analisis data menunjukkan cahaya lampu mempengaruhi produktivitas. Belakangan diketahui, mereka, yang produktivitas kerjanya meningkat, ternyata karena merasa diperhatikan dengan baik (selama mereka diamati dalam penelitian).

Generalisasi: tidak ada generalisasi. Chalmers menggambarkan dalam generalisasi-induktif, kemusykilan dan persoalan-persoalan cukup serius. Misalnya, untuk memenuhi persyaratan generalisasi: harus ada sejumlah keterangan observasi yang cukup besar, walau seberapa banyak jumlah observasi itu bersifat ambigu. Seorang iduktivis, yang “teguh”, mungkin harus menempatkan tangannya berkali-kali di atas api sebelum dapat menyimpulkan bahwa api itu panas dan membakar (Chalmers, 1982:16).

Kemudian juga, apa yang menjadi jaminan, bahwa dari sejumlah penggalan-penggalan observasi itu, bisa ditarik kesimpulan umum. Generalisasi, yang ditarik dari ribuan keterangan-observasi, misalnya, menjadi sia-sia jika kemudian ditemukan satu observasi yang bertentangan dengan generalisasi tadi.

Kausalitas banyak (multiple causality). Prinsip kausalitas linear, jika dipertahankan dalam memandang realitas, membawa implikasi sangat serius. Realitas menjadi sangat disederhanakan, dalam hubungannya antarsatu fakta dengan fakta lainnya. Jika ditemukan, X menyebabkan Y, maka kedua variabel tersebut dipandang memiliki hubungan pasti, tanpa intervensi variabel lainnya.

Menurut Rakhmat (1990), penemuan mutakhir dalam berbagai bidang menunjukkan bahwa berbagai sebab —dan bukan sebab tunggal— berinteraksi sesama mereka dalam menimbulkan akibat.

Dengan demikian, jika dalam suatu penelitian ditemukan, Y diakibatkan oleh X, maka sebetulnya, penyebabnya bukan sekadar X, sebagaimana diyakini positivisme. Di samping X, terdapat variabel-variabel lain, yang saling berinteraksi dan menyebabkan Y. Selain itu, X bersama variabel-variabel lainnya itu tidak hanya menimbulkan Y, tapi juga mengakibatkan yang lainnya.

Oleh karena itu, kausalitas linear, yang

dipertahankan positivisme, sebetulnya, terjebak pada proses reduksi terhadap realitas yang sebenarnya.

Sarat nilai. Berdasarkan positivisme, agar dalam penelitiannya bebas nilai, seorang peneliti terlebih dahulu menetapkan patokan-patokan dasar teoritis. Dalam kenyataan, banyak sekali metode dan kerangka teoretis bisa dipilih. Karena itu, terbukalah kemungkinan-kemungkinan tak terhingga, untuk merancang suatu program penelitian (Magnis-Suseno, 1992: 201). Akan tetapi, bagaimanapun, dari segala macam kemungkinan itu, si peneliti harus memilih salah satu, dengan mengabaikan kemungkinan-kemungkinan lain. Untuk itu, perlu ada patokan kerangka acuan teoritis yang akan digunakan. Pilihan kerangka acuan teoritis itu sendiri ditentukan oleh suatu pertimbangan, yang didasarkan pada nilai, atau kepentingan tertentu.

Maka, jelaslah bahwa dalam penelitian, keterlibatan kepentingan dan nilai itu merupakan sesuatu yang tak terhindarkan. Positivisme beralih, bahwa betul, penentuan tujuan penelitian dan kerangka acuan teoritis, persoalan nilai ikut campur, tetapi untuk mencapainya harus menggunakan sarana-sarana yang netral nilai. Tetapi, kata Habermas, hal ini tak mungkin dapat dilaksanakan. Bagaimanapun, sarana dan tujuan tidak lagi dapat diisolasi.

Bagi Habermas, selain awal suatu pengembangan ilmu pengetahuan sudah “ditumpangi” nilai ilmuwan, ilmu juga harus “ditundukkan” pada kepentingan, dan nilai, yang positif bagi umat manusia, yaitu tumbuhnya emansipasi. Jika secara aksiologis, ilmu dikembangkan tanpa dasar nilai positif, bagi kehidupan, ilmu memiliki peluang untuk disalahgunakan dalam penghancuran kehidupan umat manusia itu sendiri.

4. Penutup

Dengan mengacu Chalmers (1982:xx), dan apa yang telah diuraikan, dapatlah dirumuskan, bahwa positivisme merupakan suatu bentuk ekstrem empirisme; yang berpendapat bahwa suatu teori,

atau ilmu pengetahuan, hanya *benar* sejauh dapat dibuktikan dengan fakta-fakta melalui observasi; dan dipertimbangkan sebagai punya makna, hanya selama dapat dibuktikan oleh fakta-fakta observasi (verifikasi). Teori, dan ilmu pengetahuan, tak lain adalah untuk mengungkapkan kebenaran tentang realitas.

Harus diakui, pengaruh positivisme dalam ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu komunikasi, masih sangat kuat dan luas. Hal ini, misalnya, bisa dilihat dalam rumusan- rumusan metodologi penelitian. Masalah generalisasi, objektivitas, deskripsi sebab-akibat, yang sederhana, kerap ditemukan.

Tak bisa dipungkiri, memang, bahwa positivisme berjasa dalam mengembangkan metodologi ilmiah, di samping dosa-dosanya yang juga cukup besar. Karena itu, pemahaman asumsi-asumsi positivisme, dan kritik-kritik terhadapnya, cukup penting bagi para ilmuwan. Sebab, hal ini, secara filosofis, sangat pendasar. Penting disadari, positivisme telah memberikan landasan sistematis, dan membantu cara berpikir dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Positivisme telah memberikan bimbingan, melalui verifikasi dalam proses penelitian, misalnya. Tetapi juga, dengan memahami kritik-kritik tadi, penting juga disadari bahwa penalaran ilmu pengetahuan positivisme, telah memperkecil realitas. Padahal realitas itu sangat kaya dan penuh nuansa. Realitas direduksi ke dalam gambaran yang kering dan miskin, sehingga realitas sesungguhnya (yang diungkap) bisa keliru, dan menyesatkan.

Dengan demikian, betapapun serangan bertubi-tubi dilancarkan pada positivisme, masih ada sejumlah manfaat yang bisa dipetik. Kritik-kritik tajam itu, mungkin, tak bisa menghapus seluruh penalaran yang didasarkan pemahaman positivisme. Kritik-kritik demikian harus dipandang sebagai proses dialektis, untuk menemukan pendekatan yang dianggap lebih baik. Dalam hal ini, ada baiknya mengutip seorang penggugat positivisme, yang secara arif menyatakan,

Kita tidak perlu meninggalkan sama sekali paradigma klasik yang mewariskan tradisi penelitian dengan pendekatan empirik-positivistik itu. Kita hanya ingin mendendangkan paradigma,

pendekatan, ataupun perspektif yang lebih kontekstual dan sanggup menangkap perkembangan teknologi komunikasi/informasi dan media baru yang tidak cukup lagi hanya dengan mengandalkan perangkat analisis yang mungkin sudah lama *out of date* (Ibrahim, 1999:5). ⑥

Daftar Pustaka

- Bertens, K., 1981, *Filsafat Barat dalam Abad XX*. Gramedia, Jakarta.
- Charon, Joel M., 1979. *Symbolic Interactionism, An Introduction, An Interpretation, An Integration*. Prentice-Hall International, Inc., London.
- Chalmers, A.F., 1983. *Apa Itu yang Dinamakan Ilmu?*. Hastamitra, Jakarta.
- Hadi, P. Hardono, 1994. *Epistemologi Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Hardiman, Fransisco Budi, 1993. *Kritik Ideologi, Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Hidayat, Dedy N. 1999. "Pardigma dan Perkembangan Penelitian Komunikasi," dalam *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*. Vol. III/April 1999 (hal. 32-43).
- Ibrahim, Idi Subandy. 1999. "Matinya Ilmu Komunikasi?" dalam *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*. Vol. III/April 1999 (hlm. 1-5).
- James, Beverly. 1999. "Perspektif Humanis Radikal dalam Penelitian Komunikasi Massa," dalam *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*. Vol. III/April 1999 (hal. 56-65).
- Jensen, Klaus Bruhn and Nicholas W. Jankowski (ed.), 1993. *A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research*. Routledge, London.

-
- Johnson, Doyle Paul, 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jilid 1. Terj.: Robert M.Z. Lawang. Gramedia, Jakarta.
- _____, 1990. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jilid 2. Terj.: Robert M.Z. Lawang. Gramedia, Jakarta.
- Magnis-Suseno, Franz, 1992. *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*. Kanisius, Yogyakarta.
- May, Tim. 1997. *Social Research: Issues, Method, and Process*. Open University Press, Buckingham.
- Mulyana, Deddy. 1999. "Kendala-kendala Pengembangan Penelitian Komunikasi di Indonesia." dalam *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*. Vol. III/April 1999 (hal. 17-31).
- Rakhmat, Jalaluddin, 1989. *Metode Penelitian Komunikasi*. Remadja Karya, Bandung.
- _____, 1990. "Penelitian Pascapositivisme". Makalah, disampaikan pada Seminar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Bandung.
- _____, 1990b. "Penelitian Komunikasi Antarbudaya," dalam Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat (ed.), 1990. *Komunikasi Antarbudaya*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- _____, 1999. "Kritik Paradigma Pasca-Positivisme terhadap Positivisme," dalam *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*. Vol. III/April 1999 (hal. 66-71).
- Ritzer, George. 1996. *Modern Sociology Theory*. McGraw-Hills Companies, Inc., New York.
- Sears, David O., 1991. *Psikologi Sosial*. Jilid 2. Terj: Michael Adryanto. Airlangga, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1993. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Subangun, Immanuel, 1994. *Dari Saminisme ke Posmodernisme*. CRI Alocita, Yogyakarta.
- Thoha, Miftah, 1983. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Rajawali Pers, Jakarta.

